



Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020

Faiz Albar Nasution*, Muhammad Husni Thamrin & Alwi Dahlan Ritonga

Departemen Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

Departemen Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, 45363, Indonesia

Submitted : 8 May 2020 Revision : 3 June 2020 Accepted : 13 July 2020

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat Kota Medan terhadap Pemilihan Walikota Medan. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi, partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan sejak reformasi hingga saat ini, cenderung mengalami tingkat partisipasi yang rendah. Fenomena tersebut, cukup mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Medan tidak memiliki orientasi dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah. Oleh sebab itu, menakar partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2020 menarik untuk dipelajari, agar menjadi referensi dan bahan refleksi dalam menekan angka golongan putih di Kota Medan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan data skunder berupa jurnal, dokumen, surat kabar dan data primer melalui wawancara mendalam kepada informan yang berasal dari lembaga penyelenggara Pemilu, organisasi politik dan sosial. Analisa data menggunakan teknik Miles dan Huberman antara lain: reduksi data, display data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat Kota Medan didominasi partisipasi dalam pemberian suara dan *apathy total*. Selain itu, faktor - faktor yang menentukan tingkat partisipasi pada Pilkada 2020 mendatang yaitu; kepercayaan terhadap pemerintah, peran partai dalam rekrutmen politik dan pemutakhiran data pemilih.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah.

Abstract

This study examines the political participation of the Medan City community to the Medan mayor elections. One indicator of the success of the elections, can be seen from the community participation in the exercise of the right of choice. However, voters ' participation in Medan city elections since reform to date, tends to have a low level of participation. The phenomenon, quite indicating that the community of the city of Medan has no orientation in using the right to select the regional head election. Therefore, the estimative participation of voters in the city elections in Medan year 2020 interesting to learn, to be a reference and reflection material in the press of the number of abstainers in Medan. This research is done by a qualitative method of descriptive. Data collection techniques using secondary data in the form of journals, documents, newspapers and primary data through in-depth interviews to the informant that originated from the agency of elections, political and social organisations. Data analysis using the Miles and Huberman techniques are: data reduction, data display and draw conclusions. The results of the study showed the community participation in Medan is dominated by participation in voting and total apathy. In addition, the factors that determine the level of participation in the upcoming elections 2020 are; Government, the party's role in political recruitment and the update of voters data.

Keywords: *political participation, regional elections.*

How to Cite: Nasution, F. A. Thamrin, M. H. & Ritonga, A. D. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020, *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, Vol 12 (2): 97-113.

*Corresponding author:

E-mail: faiznasution92@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan gagasan besar dalam mengubah struktur politik di dunia. Selain itu, hadirnya demokrasi memberikan harapan baru terhadap kedaulatan rakyat (Kusmanto, 2014). Aktivitas tersebut, tercermin dari partisipasi masyarakat untuk membatasi para elit dalam menyalahgunakan norma dan prosedur demokrasi. Ketika elit berperan secara dominan terhadap sistem politik, institusi menjadi lebih rentan dan kelangsungan hidup berdemokrasi berisiko (Lussier, 2016).

Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pemerintah pusat menjadikan Pemilihan Kepala Daerah sebagai instrumen penting dalam penyelenggara pemerintahan daerah yang demokratis. Dengan demikian, partisipasi masyarakat mengakar pada tingkat daerah dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan - kegiatan pemerintah daerah (Aulich, 2009). Selain itu, Kota Medan akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota

Medan. Akan tetapi, partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan hingga saat ini, cenderung mengalami tingkat partisipasi yang rendah. Berikut data partisipasi masyarakat pada setiap Pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan ;

Tabel 1.1 Data Partisipasi Masyarakat Kota Medan pada Pilkada

Pilkada	Tahun	Jumlah Pemilih	Tingkat Partisipasi
Walikota	2005	1.450.596	54,70%
Gubernur	2008	1.725.045	47,10 %
Walikota	2010	1.961.723	38,28%
Gubernur	2013	2.123.878	36,58 %
Walikota	2015	1.998.835	25,38 %
Gubernur	2018	1.641.648	55,80 %

Sumber : KPUD Kota Medan Tahun 2019

Data partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan menunjukkan pola yang menarik untuk dipelajari. Sejak reformasi, hingga saat ini partisipasi Pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan terlihat tidak pernah menyentuh angka 60%. Hemat penulis, berdasarkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota Tahun 2005 hanya mencapai 54,70%, Pemilihan Walikota Medan Tahun

2010 sebesar 36,28% dan Pemilihan Walikota 2015 partisipasi 25,38%. Kondisi serupa, dapat dilihat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur 2008 47,10%, Pemilihan Gubernur 2013 36,58% dan Pemilihan Gubernur 2018 mencapai 55,80% (Kpu Kota Medan, 2019). Fenomena tersebut, cukup mengindikasikan bahwa euforia Pilkada, secara empiris tidak diikuti oleh jumlah pengguna hak pilih. Sehingga partisipasi pemilih sebagai indikator keberhasilan Pilkada tidak terpenuhi dan tidak sebanding dengan anggaran yang diberikan sampai miliaran rupiah (Nasution, 2019).

Selanjutnya, partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015, secara nasional Kota Medan menduduki partisipasi terendah dengan 25,38% (Khair, 2020). Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan melakukan evaluasi terhadap tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015. Hasil evaluasi menunjukkan rendahnya partisipasi pemilih dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor

internal berupa teknis penyelenggara pemilu, seperti : daftar pemilih tetap belum mutakhir yang berimplikasi pada pemetaan tempat pemungutan suara Distribusi C6, Kinerja petugas pemutakhiran data pemilih dan faktor Eksternal meliputi : figur pasangan calon, peran partai politik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah (Damanik, 2018). Sehingga, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu sangat menentukan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya (Adela, 2017).

Penelitian terdahulu, telah banyak melakukan analisis terhadap partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi, perilaku tidak memilih masih menjadi masalah krusial. Hal tersebut, merupakan salah satu ciri ilmu sosial yang sangat dinamis dan terus berkembang. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi yaitu Filla & Johnson yang menunjukkan informasi pemerintah daerah mempengaruhi jumlah pemilih

dalam pemilihan di daerah (Filla & Johnson, 2010). Selain itu, hasil penelitian Archon Fung menjelaskan tantangan partisipasi masyarakat disebabkan minimnya kepemimpinan populer, sistematis dan inovasi (Fung, 2015).

Selanjutnya, temuan Ank Michels memperlihatkan partisipasi warga memiliki sejumlah efek positif pada sistem demokrasi, hal ini dapat meningkatkan pengetahuan individu, keterampilan dan keterlibatan untuk memberikan rekomendasi terhadap kebijakan (Michael, 2011). Hasil penelitian Hogan membuktikan tingkat pengeluaran kampanye yang lebih tinggi meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pileg di negara bagian Amerika Serikat (Hogan, 2013). Hasil penelitian Stockemer secara empiris, tingkat partisipasi yang rendah dalam pemilihan Uni Eropa terkait langsung dengan penolakan warga terhadap proyek Uni Eropa (Stockemer, 2012). Tesis Asmara Pane menunjukkan bahwa rendahnya Partisipasi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 di Kota Padangsidimpuan

dipengaruhi Minimnya sosialisasi, rasa jenuh terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah dan tidak memberi manfaat secara langsung bagi masyarakat (Pane, 2015). Selain itu, tesis Siringoringo menunjukkan rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Kota Medan tahun 2015 dipengaruhi lemahnya peran Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan sosialisasi, pendidikan dan komunikasi politik (Siringoringo, 2016).

Penelitian dalam artikel ini pada dasarnya mengambil posisi yang berbeda dalam beberapa hal dengan penelitian - penelitian sebelumnya. Masalah tersebut dapat dilihat dari perilaku tidak memilih pada setiap Pilkada menggambarkan buruknya kualitas demokrasi di Kota Medan. oleh sebab itu, mencermati proses serta proyeksi Pilkada tahun 2020 di Kota Medan penting untuk dilakukan. Fokus permasalahan yang menarik untuk dipelajari, yakni: kepercayaan terhadap pemerintah, peran partai dalam rekrutmen politik dan pemutakhiran data pemilih. Dengan demikian, masalah yang akan dihadapi pada

Pilkada tahun 2020, tentunya akan berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sebagai gambaran atau objek terhadap fenomena sosial berdasarkan gejala - gejalanya (Nawawi, 2017). Fokus penelitian ini adalah menakar partisipasi politik masyarakat Kota Medan terhadap Pemilihan Walikota Medan tahun 2020. Lokus penelitian terdapat pada Kota Medan yang terdiri dari 21 Kecamatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data skunder berupa buku, jurnal, dokumen, media cetak dan kanal berita elektronik. Selain itu, data primer didapatkan dengan wawancara mendalam kepada informan yang berasal dari lembaga penyelenggara Pemilu, organisasi politik dan sosial. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif tersebut meliputi: reduksi data, display data, dan penarikan

kesimpulan (Miles, Huberman & Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menakar partisipasi politik masyarakat di Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan bukan hal yang mudah. Akan tetapi, data partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki hasrat dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini, dapat dibuktikan dengan hasil rekapitulasi suara disetiap Pemilihan Kepala Daerah yang cenderung mengalami tingkat partisipasi rendah. Kondisi tersebut, berbanding terbalik dengan hasil Pemilihan Umum tahun 2019 yang menunjukkan partisipasi sebesar 74% pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Meski, angka partisipasi tidak mencapai target nasional. Namun, capaian partisipasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tergolong cukup signifikan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (Suhartono, 2020).

Selanjutnya, perhelatan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 menunjukkan tingkat partisipasi di Kota Medan sebesar

55,80%. Selain itu, terdapat 4 Kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi rendah, seperti Kecamatan Medan Maimun, Medan Baru, Medan Kota dan Medan Sunggal. Oleh karena itu, wilayah yang rentan terhadap partisipasi dijadikan prioritas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi pemilih (Siregar, 2019). Hemat tersebut, senada dengan pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang mengatakan: "Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 terdapat lima daerah yang mengalami tingkat partisipasi rendah dan paling ekstrim di Medan Amplas tingkat partisipasi hanya 21,6%, namun pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 daerah tersebut keluar dari zona rawan partisipasi dengan 61,4 %. Saat ini yang belum keluar zona rawan partisipasi yaitu Kecamatan Medan Maimun, Medan Baru, Medan Kota dan Medan Sunggal yang menjadi tingkat partisipasi terendah dalam

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018".

Menyitir Rush dan Althoff dalam hierarki partisipasi politik terdapat seseorang yang menduduki atau mencari jabatan politik dari keterlibatan anggota organisasi politik dan semu politik. Selain itu, individu berpartisipasi dalam rapat umum dan diskusi politik. Tambahan pula, individu hanya berpartisipasi dalam pemberian suara atau *apathy* total (Rush & Althoff, 2011).

Hierarki tersebut, menunjukkan semakin tinggi hierarki, maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan individu. Akan tetapi, partisipasi masyarakat Kota Medan didominasi partisipasi dalam pemberian suara dan apatis.

Hemat penulis, berdasarkan pendapat Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang mengatakan: "Tingkat partisipasi masyarakat Kota Medan terbagi dalam dua kategori; rasional dan emosional. *Pertama*, rasional pemilih dalam memilih berdasarkan

patronase yang bersifat spontan dan sesaat, *Kedua*, emosional pemilih dipengaruhi pragmatisme dalam memilih salah satu calon. Hal ini dipengaruhi karena menilai tidak ada bermanfaatnya kepada dirinya secara langsung”.

Partisipasi masyarakat Kota Medan, jika di analisis dengan teori hierarki partisipasi terbagi dalam partisipasi pemberian suara dan *apathy* total. Masyarakat berpartisipasi dalam pemberian suara dipengaruhi patronase budaya dan agama. Kondisi tersebut, disebabkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sarat dengan isu identitas seperti: putra daerah dan Islam sangat menentukan tingkat partisipasi di Kota Medan (Nasution, 2019). Apabila berkaca pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 010 dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, cukup membuktikan bahwa politik identitas sangat mewarnai keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya (Pasaribu, 2018).

Hemat penulis, senada dengan pernyataan Komisioner Komisi

Pemilihan Umum Daerah Kota Medan Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang mengatakan: “ Pemilihan Walikota Tahun 2010 partisipasi hanya 38,28%, kekalahan Sofyan Tan diakibatkan adanya politik identitas seperti suara kaum Islam yang tidak memberikan suaranya kepada Sofyan Tan. Fenomena tersebut, kembali terjadi di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. Kenaikan partisipasi disebabkan politik identitas seperti isu Islam dan putra daerah yang dibawa oleh tim pemenangan Edy - Musa dan sosok Ulama tetap menjadi patron”.

Selain itu, masyarakat Kota Medan *apathy* total disebabkan sifat emosional pemilih yang cenderung pragmatisme. Hal ini dipengaruhi Kepala Daerah di Kota Medan tidak melakukan perubahan dan inovasi yang berdampak secara langsung, bahkan beberapa Kepala Daerah sebelumnya memiliki reputasi buruk. Oleh sebab itu, kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah sangat mempengaruhi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih

di Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan.

Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Sistem politik pada dasarnya merupakan serangkaian struktur dan proses yang saling berkaitan dalam menjalankan kekuasaan secara sah. Selain itu, sistem politik akan berfungsi apabila *input* dan *output* berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hubungan antara *input* dan *output* akan menghasilkan keputusan - keputusan penting bagi masyarakat. Namun, sampai saat ini masyarakat Kota Medan masih sulit untuk memberikan stereotipe positif terhadap Pemerintah Kota Medan. Kondisi tersebut, disebabkan minimnya penanganan infrastruktur, dan Korupsi di Kota Medan (Tigor, 2019; Damanik, 2017; Nurita, 2016; Yoseph, 2019). Sehingga, tuntutan (*input*) dari masyarakat atas masalah pelayanan publik mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Faktor kepercayaan kepada pemerintah sangat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat. Sterotipe masyarakat terhadap kinerja pemerintah dari

pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program - program yang dijanjikan, akan memberikan kepercayaan kepada Kepala Daerah dan calon Kepala Daerah untuk diberi amanah (Surbakti, 2010). Akan tetapi, secara keseluruhan mantan - mantan Kepala Daerah di Kota Medan memiliki reputasi buruk seperti, Walikota Medan Abdilah 2005 - 2010, Gubernur Sumut Syamsul 2008 - 2013, Walikota Medan Rahudman 2010 - 2015, Gubernur Sumut Gatot 2013 - 2018 dan Walikota Medan Dzulmi Eldin 2015-2020 terjerat kasus korupsi (CNN Indonesia, 2019). Oleh sebab itu, rendahnya kepercayaan terhadap kinerja Kepala Daerah mengakibatkan masyarakat tidak memiliki orientasi dan minat untuk ikut serta di Pemilihan Kepala Daerah. Hemat tersebut, senada dengan pernyataan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Kota Medan yang mengatakan : "Masyarakat jenuh atas diperlihatkan kasus-kasus hukum dari Kepala Daerah, baik Gubernur Sumatera Utara dan Walikota Medan. Puncak kejenuhan

masyarakat terlihat di Pemilihan Walikota Tahun 2015 yang hanya mencapai 25,38% tingkat kehadirannya. Hal ini dipengaruhi masyarakat sudah mulai pintar dan kritis terhadap kepemimpinan di Kota Medan”.

Partai politik sadar akan rendahnya partisipasi dipengaruhi masalah Kepemimpinan di Kota Medan. Selain itu, pendapat serupa dapat dibuktikan dari Ketua Hikma Kota Medan yang menyebutkan: “Masyarakat Kota Medan lebih melek politik, sebab rendahnya partisipasi dipengaruhi penilaian masyarakat terhadap visi/misi dari calon yang dinilai hanya sebagai janji, tanpa ada aktualisasinya. faktor ini didasarkan pengalaman masyarakat terhadap Kepala Daerah sebelumnya yang tidak memenuhi janjinya”.

Meskipun pandangan selama ini cenderung mendiskriminasi seseorang tidak memilih adalah tindakan yang apatis dan tidak bertanggungjawab. Masyarakat Kota Medan tidak serta merta menunjukkan orientasi kepribadian yang apatis (Cahyono, 2019).

Perilaku tersebut, dibuktikan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap figur pasangan calon dan masalah- masalah di Kota Medan (Medan Tribun, 2019). Oleh sebab itu, perilaku tidak memilih berindikasi sebagai peringatan dari masyarakat atas kekecewaan yang tidak diperhatikan kepentingannya. Oleh karena itu, Kepala Daerah sudah sepatutnya memberikan perubahan dan pemberdayaan secara berkelanjutan (Nasution, 2020). Sehingga, kinerja yang diberikan mendapatkan apresiasi dan timbulnya kepercayaan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Peran Partai Dalam Rekrutmen Politik

Salah satu masalah yang menjadi perhatian publik, bagaimana peran partai politik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. Menyitir Diamond dan Gunter Mengidentifikasi fungsi partai politik dalam demokrasi elektoral. *Pertama*, partai melakukan mobilisasi kepada pemilih untuk mendukung calon dan memfasilitasi

kegiatan dalam pemilihan. *Kedua*, penataan masalah dilakukan partai untuk mengelola isu dari kepentingan berbagai kelompok sosial. *Ketiga*, mewakili berbagai kelompok sosial, baik secara simbolis dan memajukan kepentingan tertentu. *Keempat*, agregasi kepentingan dilakukan untuk stabilitas kebijakan dalam jangka panjang. *Kelima*, peran partai dalam integrasi sosial memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik (Diamond, Larry and Gunter, 2001).

Selanjutnya, peran partai politik dalam Pilkada langsung lebih pada posisi menyediakan legitimasi pencalonan. Namun, hasil penelitian Hanafi membuktikan bahwa kegiatan pencalonan di Pemilihan Kepala Daerah sarat dengan kepentingan dari elite partai. Kondisi tersebut, menyebabkan calon Kepala Daerah tidak memiliki kompetensi yang baik. Sehingga partai politik hanya dijadikan sebagai kendaraan politik, tanpa melihat suara kritis publik terhadap persoalan korupsi di daerah (Hanafi, 2014). Secara sporadis korupsi di Kota Medan

disebabkan partai tidak melakukan rekrutmen politik yang demokratis. Hemat penulis, dapat dibuktikan dengan pernyataan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu Sumut yang mengatakan : “Rendahnya partisipasi di Kota Medan disebabkan gagalnya partai politik memberikan sosok calon yang berkualitas, masyarakat masih saja trauma dengan masa lalu Kepala Daerah yang dilahirkan oleh partai politik terjerat kasus korupsi, hal ini mempengaruhi masyarakat untuk tidak peduli dengan Pilkada dan Tidak Menggunakan hak pilih”.

Produk rekrutmen politik yang buruk diakibatkan belum terbentuknya sistem rekrutmen politik yang baku, terbuka, demokratis, dan akuntabel. Sebagian partai politik mendasarkan sumber rekrutmen politik dari lingkungan keluarga dan kekerabatan politik. Sehingga cenderung tertutup, eksklusif, dan nepotisme. Meskipun ada prosedur formal yang dimiliki partai dalam proses rekrutmen, pada realitasnya prosedur tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh pimpinan partai (KPK & LIPI, 2016).

Oleh karena itu, partai berusaha mencalonkan kandidat yang berkompeten, walau dalam prosesnya sarat dengan isu identitas. Hemat tersebut, didukung pernyataan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Kota Medan yang mengatakan : “Rendahnya partisipasi di Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, sebagai pertanda bahwa calon yang dihadirkan partai belum mampu meyakinkan masyarakat. Oleh sebab itu, pada Pilgubsu 2018 partai Gerakan Indonesia Raya mengusung Edy dan Musa. Selain itu, partai lainnya mengusung Djarot dan Sihar. Kedua calon dianggap figur yang diinginkan masyarakat, sehingga berdampak terhadap tingkat partisipasi masyarakat jika dibandingkan dengan Pilkada 2015”.

Proses rekrutmen politik merupakan manifestasi dari dinamika dan demokrasi internal partai. Semakin demokratis kehidupan partai, maka semakin demokratis pula proses rekrutmen politik. Dengan demikian, keterlibatan elite partai harus menjamin berlangsungnya seleksi

yang terbuka, demokratis dan akuntabel. Oleh sebab itu, partai politik sudah seharusnya memberikan kader terbaik pada kontestasi Pilkada. Sehingga stereotipe negatif masyarakat terhadap calon akan berubah dan kompetensi yang dimiliki calon, akan berdampak pada tingkat partisipasi di Pilkada Kota Medan tahun 2020.

Pemutakhiran data Pemilih

Urgensi pemutakhiran data pemilih menjadi indikator terpenting dari keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi, masalah data pemilih masih menjadi persoalan klasik yang tak kunjung tuntas. Masalah ini didasarkan tidak efektifnya proses pemutakhiran data pemilih di Kota Medan. Secara sporadis pemutakhiran data pemilih tidak dilakukan dengan pencocokan dan penelitian (coklit) secara faktual. Sehingga, berimplikasi pada hak konstitusional masyarakat, sulitnya menentukan anggaran biaya dan ketersediaan surat suara (Damanik, 2018)

Selanjutnya, hasil evaluasi Komisi Pemilihan Umum Kota

Medan pasca Pilkada 2015 menunjukkan rendahnya partisipasi pemilih disebabkan Daftar Pemilih Tetap belum mutakhir. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan melakukan kegiatan cokolit terhadap Pilkada Kota Medan. Kondisi tersebut, dapat dibuktikan dengan pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan Divisi Partisipasi masyarakat dan Sumber Daya Manusi yang mengatakan : “Komisi Pemilihan Umum Kota Medan melakukan cokolit untuk persiapan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Kami berkordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan dalam melakukan “cokolit” selama 1 bulan. Hasilnya pemutakhiran data pemilih terdapat 441.170 pemilih yang dihapus dan itu diperbolehkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 04 tahun 2015 seperti 11 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, terdapat 8 langkah pencoretan data pemilih yang dikualifikasikan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan dibuat berita

acaranya. Akhirnya semula Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2015 sebanyak 1.961.471 berubah menjadi 1.520.301 pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018”.

Proses Pemutakhiran data pemilih merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/2015 tentang pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi, proses pembenahan data pemilih di Kota Medan mendapatkan *stereotype* negatif dari masyarakat. Hemat tersebut, melihat jumlah Daftar Pemilih Tetap yang sudah dicoret pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, hadir dengan jumlah 300.000 pemilih. Walau pemilih dapat menggunakan hak pilih, namun masalah ketersediaan surat suara mengakibatkan masyarakat tidak maksimal dalam menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut, berdasarkan pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan Divisi Partisipasi Masyarakat dan Manusia yang mengatakan: “Pada hari pemungutan suara, masyarakat yang sudah di coret

sebagai Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), muncul kembali sekitar 300.000 ribu jiwa, Namun, masalah yang terjadi kekurangan surat suara, tetapi kami sudah sesuai mekanisme dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian (coklit)".

Ketersediaan surat suara pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018 disebabkan pencoretan data pemilih sebesar 441.170. Faktor tersebut, dipengaruhi tingginya mutasi penduduk tidak sejalan dengan keterlibatan masyarakat dalam mengurus administrasi penduduk. Selain itu, masalah data pemilih dan kondisi saat Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018 merujuk pernyataan dari Ketua Komite Independen Pemantau Pemilihan Umum yang mengatakan: "Khusus Kota Medan masalah yang banyak ditemui yaitu: data ganda, undangan, ketersediaan surat suara, seperti di Kecamatan Medan Denai Kecamatan Medan Amplas. Sehingga banyak pemilih tidak bisa memilih. Tambahan lagi, di Kecamatan Medan Maimun minimnya kesiapan Komisi Pemilihan Umum seperti pendataan,

undangan C6 yang diberikan tidak tepat yang dipengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus surat pindah". Problematika data pemilih di Kota Medan dipengaruhi multi faktor. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergi dan perhatian bersama dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Medan. Selain itu, Pilkada sebagai sarana kedaulatan rakyat harus dilindungi kuantitas dan kualitasnya. Dengan demikian, pembenahan data pemilih diharapkan mampu dilakukan secara faktual, agar masyarakat tidak skeptis dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga, pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tidak hanya sekedar meningkatkan partisipasi pemilih, akan tetapi masyarakat teredukasi dan cerdas dalam mengambil peran dalam seluruh tahapan proses Pilkada.

SIMPULAN

Hasil penelitian memperlihatkan partisipasi masyarakat pada setiap Pilkada di Kota Medan didominasi partisipasi dalam pemberian suara dan *apathy*

total. Selain itu, faktor yang menentukan tingkat partisipasi di Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan tahun 2020. *Pertama*, rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah disebabkan mantan Kepala Daerah memiliki reputasi buruk dan tidak memberikan dampak terhadap pelayanan publik di Kota Medan. *Kedua*, peran partai dalam rekrutmen politik tidak berjalan secara demokratis, hal ini didasarkan calon Kepala Daerah yang diusung partai tidak mendapatkan stereotipe positif dari masyarakat. *Ketiga*, pemutakhiran data pemilih di Kota Medan masih memiliki masalah yang disebabkan KPU belum efektif dalam melakukan pencocokan dan teliti data (coklit) secara faktual. Sehingga berdampak terhadap hilangnya hak konstitusional masyarakat, sulitnya menghitung anggaran biaya dan ketersediaan surat suara.

DAFTAR PUSTAKA

Adela, F. P. (2017). Partisipasi Rakyat Dalam Pengawasan Pilkada, Antisipasi Tingginya Angka Golput Di Pilkada Sumut 2018. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 107-118.

Retrieved from <http://jurnal.bawaslu.go.id/Edisi-I.pdf#page=112>

Michels, A. (2011). Innovations in Democratic Governance: How Does Citizen Participation contribute to a Better democracy? *International Review of Administrative Sciences*, 77(2), 275-293.

<https://doi.org/10.1177/0020852311399851>

Aulich, C. (2009). From Citizen Participation to Participatory Governance in Australian Local Government. *Commonwealth Journal of Local Governance*, 2(2), 44-60. Retrieved from <https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=029581916393484;res=IELHSS>

Fillia & Johnson. (2010). Local News Outlets and Political Participation.

Journals.Sagepub.Com, 45(5), 679-692.

<https://doi.org/10.1177/1078087409351947>

Fung, A. (2015). Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and Its Future. *Public Administration Review*, 75(4), 513-522.

<https://doi.org/10.1111/puar.12361>

Hanafi, R. I. (2014). Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 1-16.

- Retrieved from <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/197/81>
- Hogan, R. E. (2013). Campaign Spending and Voter Participation in State Legislative Election. *Social Science Quarterly*, 94(3), 840–864. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2012.00897.x>
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(1), 78–90. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.582>
- Nasution, F. A. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 7(2), 227–235. Retrieved from <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/3015/2302>
- Nasution, F. A. (2020). Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Membuat Peraturan Desa di Desa Bandar Khalipah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 53–60. <https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.%25p>
- Pasaribu, I. (2018). Bekerjanya Politisasi Identitas Pada Pilkada Sumut 2018 (Menakar Pengaruh Isu Agama Terhadap Kemenangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(1), 11–28. Retrieved from https://ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/informasi_public/4. Jurnal Adhyasta Pemilu 02.pdf#page=15
- Stockemer, D. (2012). Citizens' support for the European Union and participation in European Parliament elections. *SAGE Publication*, 13(1), 26–46. <https://doi.org/10.1177/1465116511419870>

Buku teks

- Diamond, L & Gunter, R. (2001). *Political Parties and Democracy*. United States of America: The Johns Hopkins University Press.
- Lussier, D. N. (2016). *Constraining Elites in Russia and Indonesia (Political Participation and Regime Survival)* (First). New York: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/slr.2019.104>
- Miles, M. B., Huberman, M. & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (H. Salmon, Ed.) (3rd ed.). London: SAGE.
- Nawawi, H. (2017). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rush, M, & Althoff. P. (2011). *pengantar sosiologi politik*. (Dr.

Kartono Kartini, Ed.) (14th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. (F. A. Herfan Djoni, Ed.) (VII). Jakarta: PT Grasindo.

Karya ilmiah yang tidak dipublikasikan

Pane, P. Y. A. (2015). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Di Kota Padangsidempuan*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

Siringoringo, F. P. (2016). *Lemahnya Upaya KPU Kota Medan Dalam Meminimalisir Rendahnya Partisipasi Politik Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015*. Tesis. Universitas Negeri Medan.

Artikel dalam surat kabar/majalah umum

Cahyono, S. (2019). Wali Kota Medan Dapat Ucapan Selamat atas Predikat Kota Terjorok. *Jawapos.Com*, p. 1. Retrieved from <https://www.jawapos.com/jpg-today/23/01/2019/wali-kota-medan-dapat-ucapan-selamat-atas-predikat-kota-terjorok/>

CNN Indonesia. (2019). Tiga Wali Kota Medan Berturut-turut Terjerat Korupsi. *Cnn Indonesia.Com*, p. 1. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191016165658-12-440068/tiga-wali-kota-medan-berturut-turut-terjerat-korupsi>

Damanik, C. (2017). Jokowi: Segera Perbaiki Jalan Rusak di Medan atau Saya Duluan yang Kerjakan. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2017/10/19/08360351/jokowi-segera-perbaiki-jalan-rusak-di-medan-atau-saya-duluan-yang-kerjakan>

Kpu Kota Medan. (2019). Trend Kehadiran Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Kota Meda Sejak Tahun 2004 S/D 2019. Retrieved from <https://kpu-d-medankota.go.id/>

Medan Tribun. (2019). Aksi Vandalisme Ajak Golput, Kapolrestabes Medan Beri Peringatan Keras Pada Pelaku. *Tribun Medan*. Retrieved from <http://medan.tribunnews.com/2019/03/05/aksi-vandalisme-ajak-golput-kapolrestabes-medan-beri-peringatan-keras-pada-pelaku>

Nurita, D. (2016). Mencari Solusi Kemacetan Kota Medan. *Medanbisnisdaily.Com*. Retrieved from <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/09/14/256783/mencari-solusi-kemacetan-kota-medan/>

Ratna, P. (2018). ICW: Medan Kota paling rawan korupsi. *Republika.Co.Id*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/06/04/p9rd7v428-icw-medan-kota-paling-rawan-korupsi>

- Siregar, F. (2019). KPU Medan Targetkan Partisipasi Pemilih Meningkatkan 60 Persen di Pemilu 2019. *Tribun Medan*. Retrieved from <https://medan.tribunnews.com/2019/01/01/kpu-medan-targetkan-partisipasi-pemilih-meningkat-60-persen-di-pemilu-2019>
- Tigor, M. (2019). Hujan Sebentar Kota Medan Banjir, Drainase Buruk. *Tagar.Id*. Retrieved from <https://www.tagar.id/hujan-sebentar-kota-medan-banjir-drainase-buruk>
- Yoseph, P. (2019). Sandang Predikat Kota Terjorok, Pemkot Medan Berkelit. *Media Indonesia*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/210731-sandang-predikat-kota-terjorok-pemkot-medan-berkelit>
- KPK & LIPI. (2016). *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta. Retrieved from <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Panduan-Rekrutmen-dan-Kaderisasi-Parpol-Ideal.pdf>
- Suhartono, E. (2020). Menakar Kadar Partisipasi Pemilih di Kota Medan Menyongsong Pilkada Serentak 2020. Retrieved from <https://kpud-medankota.go.id/menakar-kadar-partisipasi-pemilih-di-kota-medan-menyongsong-pilkada-serentak-2020/>

Artikel online (internet) tanpa tempat terbit dan penerbit

- Damanik, R. A. (2018). Dinamika Validasi Data Pemilih Dan Partisipasi Pemilih Di Kota Medan. Retrieved from <https://kpud-medankota.go.id/dinamika-validasi-data-pemilih-dan-partisipasi-pemilih-di-kota-medan/>
- Khair, R. (2020). Tantangan Berat Partisipasi Pemilih di Kota Medan. Retrieved from <https://kpudmedankota.go.id/tantangan-berat-partisipasi-pemilih-di-kota-medan/>